

PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA–MALAYSIA MELALUI PERDAGANGAN LINTAS BATAS DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Nandi Supriyanto

STAI Ma'arif Sintang Kalimantan Barat
nandistg11@gmail.com

Ela Fatmawati

STAI Ma'arif Sintang, Kalimantan Barat
fatmawatiela566@gmail.com

Abstract

This study examines the economic development of the Indonesia–Malaysia border region through cross-border trade and the development of Special Economic Zones. Border areas are no longer viewed merely as administrative and security boundaries, but as strategic economic spaces with strong potential to support regional connectivity, local economic growth, investment, logistics, and ASEAN economic integration. This research uses a library-based research method, reviewing academic literature, policy documents, institutional reports, and previous studies on border trade, border governance, regional economic cooperation, and Special Economic Zones. The findings show that cross-border trade plays an important role in supporting the livelihoods of border communities, facilitating the movement of goods, strengthening local markets, and improving community welfare. However, its development still faces several challenges, including limited infrastructure, regulatory differences, weak institutional coordination, informal trade practices, and limited capacity of local economic actors. The study also finds that Special Economic Zones can function as strategic instruments to transform border areas into centers of investment, industrial processing, logistics, exports, and value-added production. Therefore, cross-border trade and Special Economic Zones should not be treated as separate policies, but as complementary instruments for border economic development. This study highlights the need for policy harmonization, infrastructure improvement, SME empowerment, digital trade facilitation, and stronger bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia. The study concludes that an integrated, collaborative development model is essential to transforming the Indonesia–Malaysia border region into an inclusive, competitive, and sustainable economic growth area.

Keywords: border economy, cross-border trade, Indonesia–Malaysia, Special Economic Zones, regional development.

Pendahuluan

Wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi regional karena tidak hanya berfungsi sebagai garis pemisah kedaulatan negara, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan perdagangan masyarakat lintas negara. Kawasan seperti Kalimantan Barat–Sarawak, Kalimantan Utara–Sabah, serta wilayah kepulauan yang berdekatan dengan Malaysia telah lama menjadi ruang mobilitas barang, jasa, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Dalam konteks pembangunan nasional, wilayah perbatasan tidak lagi dapat

dipandang sebagai halaman belakang negara, melainkan sebagai beranda depan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat konektivitas ekonomi, diplomasi kawasan, dan integrasi pasar ASEAN. Studi terbaru menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas Indonesia–Malaysia masih menjadi isu penting dalam diskursus pembangunan kawasan Asia Tenggara, terutama karena besarnya ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap perdagangan harian, konektivitas logistik, dan kebijakan lintas negara yang belum sepenuhnya terintegrasi (Raharjo, 2025).

Secara fenomenologis, perdagangan lintas batas di wilayah Indonesia–Malaysia menunjukkan realitas yang kompleks. Di satu sisi, perdagangan lintas batas menjadi sumber penghidupan utama masyarakat lokal, memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, serta membuka peluang ekonomi berbasis kedekatan geografis. Namun, di sisi lain, aktivitas tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, perbedaan regulasi, hambatan kepabeanan, praktik perdagangan informal, serta lemahnya integrasi kelembagaan antarnegara. Penelitian mengenai perdagangan lintas batas di kawasan Aruk, Sambas, misalnya, menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara Indonesia dan Malaysia mengenai status aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan; Indonesia telah memandang PLBN Aruk sebagai titik ekspor-impor, sedangkan pihak Malaysia masih melihatnya dalam kerangka perdagangan tradisional. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan tata kelola yang dapat menghambat optimalisasi ekonomi perbatasan.

Gap phenomenon dalam kajian ini terletak pada paradoks antara besarnya potensi ekonomi wilayah perbatasan dan rendahnya optimalisasi nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Wilayah perbatasan memiliki potensi sebagai simpul perdagangan, pusat logistik, jalur distribusi komoditas, dan pintu masuk kerja sama ekonomi subregional. Namun, dalam praktiknya, banyak kawasan perbatasan masih tertinggal dari sisi infrastruktur, kualitas layanan publik, kapasitas pelaku usaha lokal, serta sistem perdagangan formal. Penelitian Prameswari et al. (2024) menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu masalah utama yang menyebabkan hubungan perdagangan antara Kalimantan Utara dan Sabah belum berjalan seimbang. Selain itu, faktor integrasi kebijakan, alokasi anggaran, investasi infrastruktur, dan dukungan kelembagaan turut menentukan efektivitas perdagangan lintas batas.

Berdasarkan fenomena tersebut, research problem dalam kajian ini adalah bagaimana strategi pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia dapat dirumuskan secara lebih integratif melalui perdagangan lintas batas dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Masalah utama yang muncul bukan hanya terkait rendahnya volume perdagangan formal, tetapi juga lemahnya keterhubungan antara aktivitas ekonomi masyarakat lokal, kebijakan perbatasan nasional, dan agenda kerja sama ekonomi subregional. Selama ini, kebijakan perbatasan cenderung lebih menekankan aspek keamanan, administrasi, dan infrastruktur fisik, sementara dimensi produktivitas ekonomi lokal, penguatan UMKM perbatasan, integrasi rantai pasok, dan model kelembagaan bersama belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal,

pengembangan kawasan ekonomi di wilayah strategis perbatasan dapat menjadi instrumen penting untuk mengubah kawasan perbatasan dari ruang periferal menjadi pusat pertumbuhan baru.

Research gap dalam penelitian ini terlihat dari masih terbatasnya kajian yang menghubungkan secara langsung antara perdagangan lintas batas dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dalam satu kerangka pembangunan ekonomi perbatasan Indonesia–Malaysia. Kajian terdahulu banyak membahas kerja sama sosial-ekonomi perbatasan, perdagangan tradisional, atau tata kelola pos lintas batas secara terpisah. Raharjo (2025) menegaskan bahwa literatur mengenai kerja sama lintas batas di Indonesia–Malaysia masih lebih banyak berfokus pada konektivitas fisik, sementara aspek kelembagaan, people-to-people connectivity, dan integrasi ekonomi lokal belum banyak dikaji secara mendalam. Sementara itu, kajian Asian Development Bank mengenai special economic zones dalam kerangka Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle menekankan bahwa kawasan ekonomi khusus dapat menjadi instrumen kolaborasi subregional, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal spesialisasi klaster, koordinasi kebijakan, dan kolaborasi lintas negara (Aggarwal, 2022).

Dari sisi research novelty atau incremental newness, kajian ini menawarkan sudut pandang integratif dengan menempatkan perdagangan lintas batas dan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam pembangunan ekonomi wilayah perbatasan. Perdagangan lintas batas dapat dipahami sebagai basis ekonomi masyarakat lokal yang bersifat langsung, harian, dan berbasis kebutuhan riil, sedangkan Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai instrumen struktural untuk menarik investasi, memperkuat industri, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta membangun konektivitas logistik yang lebih modern. Dengan demikian, kebaruan kajian ini terletak pada upaya menggabungkan pendekatan mikro-ekonomi masyarakat perbatasan dengan pendekatan makro-struktural pembangunan kawasan ekonomi. Pendekatan ini penting karena pembangunan perbatasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperkuat tata kelola perdagangan, ekosistem investasi, daya saing wilayah, dan konektivitas antaraktor lintas negara.

Selain itu, kajian ini memiliki urgensi akademik karena perkembangan ekonomi kawasan Asia Tenggara semakin menuntut model kerja sama lintas batas yang lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. ASEAN telah mendorong integrasi ekonomi regional melalui harmonisasi standar perdagangan, peningkatan konektivitas, penguatan rantai pasok, dan mobilitas ekonomi lintas negara. Rencana strategis ekonomi ASEAN terbaru juga menekankan pentingnya integrasi pasar, keberlanjutan ekonomi, dan konektivitas kawasan sebagai fondasi menuju penguatan daya saing regional. Dalam konteks ini, wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia dapat menjadi laboratorium kebijakan untuk menguji bagaimana integrasi ekonomi ASEAN diterjemahkan ke dalam praktik pembangunan lokal, khususnya melalui perdagangan lintas batas dan pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis potensi wilayah.

Research urgency dari kajian ini juga terlihat dari kebutuhan praktis untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan wilayah perbatasan. Jika perdagangan lintas batas tidak dikelola secara formal, inklusif, dan produktif, maka potensi ekonomi lokal akan tetap terjebak dalam aktivitas informal, bernilai tambah rendah, dan rentan terhadap perubahan regulasi antarnegara. Sebaliknya, jika perdagangan lintas batas diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, maka wilayah perbatasan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang mendukung ekspor, investasi, industri pengolahan, logistik, pariwisata perbatasan, dan penguatan UMKM lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, penguatan kedaulatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Kajian Terdahulu

Kajian mengenai pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia telah berkembang dari pembahasan keamanan perbatasan menuju isu konektivitas, perdagangan lintas batas, tata kelola kelembagaan, dan pengembangan kawasan ekonomi. Wilayah perbatasan tidak lagi dipahami hanya sebagai ruang administratif negara, tetapi sebagai wilayah strategis yang berpotensi menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks ini, perdagangan lintas batas menjadi instrumen penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang kebutuhan pokok, mobilitas tenaga kerja, serta hubungan sosial-ekonomi antara komunitas perbatasan Indonesia dan Malaysia. Raharjo (2025) menegaskan bahwa diskursus kerja sama lintas batas Indonesia–Malaysia masih didominasi oleh isu konektivitas fisik, sedangkan aspek kelembagaan dan hubungan antarmasyarakat masih relatif kurang mendapat perhatian akademik.

Penelitian Prameswari et al. (2024) menganalisis perdagangan perbatasan antara Kalimantan Utara dan Sabah dengan pendekatan kualitatif, Focus Group Discussion, NVivo, dan Systematic Literature Review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam hubungan perdagangan perbatasan Indonesia–Malaysia. Selain itu, faktor integrasi kebijakan antarnegara, alokasi anggaran pemerintah, investasi infrastruktur, serta koordinasi kelembagaan juga memengaruhi efektivitas perdagangan lintas batas. Temuan ini menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai hasil dari kesiapan kebijakan, infrastruktur, dan kapasitas tata kelola negara.

Kajian lain oleh Darmawan (2024) membahas kebijakan tata kelola perbatasan Indonesia–Malaysia dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menekankan bahwa pengaturan pergerakan manusia dan barang di wilayah perbatasan memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, keamanan, dan

kesejahteraan masyarakat perbatasan. Namun, tata kelola lintas batas masih menghadapi tantangan berupa perbedaan regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan antara Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, pengembangan ekonomi wilayah perbatasan membutuhkan pendekatan governance yang tidak hanya berfokus pada kontrol perbatasan, tetapi juga pada fasilitasi perdagangan, pelayanan publik, dan integrasi ekonomi lokal.

Dalam konteks perdagangan lokal, studi mengenai aktivitas perdagangan di Pos Lintas Batas Negara Aruk, Sambas, menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas memiliki kontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah perbatasan. Aktivitas perdagangan di kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan lokal dan memperkuat interaksi ekonomi Indonesia–Malaysia. Namun, penelitian tersebut juga memperlihatkan adanya persoalan status dan persepsi perdagangan lintas batas, karena sebagian aktivitas masih berada dalam ruang antara perdagangan tradisional dan perdagangan formal. Hal ini menunjukkan perlunya kejelasan regulasi dan sinkronisasi kebijakan agar perdagangan lintas batas dapat berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan legal-formal.

Rudiatin (2025) meneliti ekonomi lokal-global di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya perdagangan lintas batas antara Temajuk di Kalimantan Barat dan Telok Melano di Sarawak. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap akses pasar lintas negara. Ketergantungan tersebut muncul karena kedekatan geografis, kemudahan akses terhadap barang, serta hubungan sosial-budaya yang telah terbentuk dalam jangka panjang. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, ketergantungan ekonomi lintas batas dapat menimbulkan kerentanan, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan impor, pembatasan mobilitas, atau ketidakseimbangan harga antara kedua negara.

Selain perdagangan lintas batas, kajian mengenai Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zones juga relevan dalam pengembangan ekonomi wilayah perbatasan. Aggarwal (2022) melalui kajian Asian Development Bank membahas peluang kolaborasi kawasan ekonomi khusus dalam kerangka Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle. Kajian tersebut menekankan bahwa kawasan ekonomi khusus dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan investasi, memperkuat klaster industri, mempercepat pembangunan wilayah tertinggal, dan mendorong kolaborasi ekonomi subregional. Namun, efektivitas kawasan ekonomi khusus sangat bergantung pada spesialisasi sektor, konektivitas logistik, koordinasi kebijakan, dan kemampuan kawasan dalam membangun keunggulan kompetitif.

Dalam kerangka kerja sama subregional, IMT-GT Implementation Blueprint 2022–2026 juga menegaskan pentingnya pengembangan economic corridors dan special economic zones sebagai bagian dari strategi integrasi ekonomi kawasan. Dokumen tersebut mendorong pendekatan “coopetition” dalam pengembangan kawasan ekonomi, yaitu kombinasi antara kerja sama dan kompetisi sehat antarwilayah untuk meningkatkan

daya saing subregional. Hal ini relevan bagi Indonesia dan Malaysia karena wilayah perbatasan dapat dikembangkan bukan hanya sebagai titik lintasan barang dan manusia, tetapi juga sebagai pusat produksi, logistik, investasi, dan pengolahan komoditas berbasis potensi lokal.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai perbatasan Indonesia–Malaysia telah membahas beberapa isu penting, seperti perdagangan lintas batas, tata kelola perbatasan, konektivitas, ketergantungan ekonomi masyarakat lokal, serta potensi kawasan ekonomi khusus. Namun, sebagian besar kajian masih membahas isu-isu tersebut secara terpisah. Kajian perdagangan lintas batas cenderung berfokus pada aktivitas masyarakat dan hambatan infrastruktur, sedangkan kajian kawasan ekonomi khusus lebih banyak membahas investasi, klaster industri, dan kerja sama subregional. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting karena berupaya mengintegrasikan perdagangan lintas batas dan Kawasan Ekonomi Khusus dalam satu kerangka pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, perdagangan lintas batas, dan Kawasan Ekonomi Khusus. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi yang membahas kerja sama ekonomi lintas batas dan pembangunan kawasan perbatasan. Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian bersifat konseptual dan strategis, sehingga membutuhkan pemetaan gagasan, teori, kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu untuk membangun argumentasi akademik yang komprehensif. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini dapat mengidentifikasi fenomena, research gap, serta arah pengembangan ekonomi perbatasan Indonesia–Malaysia secara lebih sistematis.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan literatur, seleksi sumber berdasarkan relevansi tema dan keterbaruan publikasi, klasifikasi isu utama, interpretasi temuan, serta sintesis konseptual. Literatur yang dikaji difokuskan pada publikasi lima tahun terakhir yang berkaitan dengan perdagangan lintas batas, tata kelola perbatasan, konektivitas ekonomi, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kerja sama subregional Indonesia–Malaysia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara aktivitas perdagangan masyarakat perbatasan, kebijakan ekonomi lintas negara, penguatan infrastruktur, dan potensi Kawasan Ekonomi Khusus sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi baru. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kerangka pemikiran mengenai strategi pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia yang berbasis integrasi perdagangan lintas batas dan pembangunan kawasan ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

1. Perdagangan lintas batas sebagai penggerak ekonomi masyarakat perbatasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Perdagangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang memiliki kedekatan geografis, budaya, dan historis. Di beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat–Sarawak dan Kalimantan Utara–Sabah, masyarakat perbatasan menggantungkan sebagian kebutuhan ekonomi pada akses pasar lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas berfungsi sebagai instrumen ekonomi lokal yang dapat mempercepat distribusi barang, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan masyarakat perbatasan.

Namun, perdagangan lintas batas masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas perdagangan belum berjalan secara optimal dan seimbang. Penelitian Prameswari et al. menunjukkan bahwa hubungan perdagangan antara Kalimantan Utara dan Sabah masih dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, integrasi kebijakan antarnegara, alokasi anggaran pemerintah, dan investasi infrastruktur. Dengan demikian, perdagangan lintas batas tidak dapat berkembang hanya dengan mengandalkan kedekatan geografis, tetapi membutuhkan dukungan infrastruktur, regulasi, dan kelembagaan yang kuat.

2. Ketidaksinkronan regulasi dan tata kelola perdagangan perbatasan

Pembahasan berikutnya menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi perbatasan adalah belum optimalnya sinkronisasi regulasi antara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan persepsi terhadap status perdagangan lintas batas dapat menimbulkan hambatan administratif dan memperlambat formalisasi aktivitas ekonomi masyarakat. Studi tentang perdagangan lintas batas di PLBN Aruk menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dilakukan di zona netral karena Malaysia masih memandang perdagangan tersebut dalam kerangka tertentu yang belum sepenuhnya sama dengan perspektif Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perdagangan lintas batas tidak hanya membutuhkan fasilitas fisik, tetapi juga membutuhkan kesepahaman kebijakan antarnegara.

Ketidaksinkronan regulasi juga dapat menyebabkan sebagian aktivitas perdagangan berada dalam ruang informal. Apabila aktivitas perdagangan masyarakat perbatasan tidak difasilitasi dengan mekanisme hukum dan administrasi yang jelas, maka potensi ekonomi lokal sulit berkembang menjadi perdagangan formal yang produktif. Oleh karena itu, tata kelola perdagangan lintas batas perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur kepabeanan, harmonisasi aturan, peningkatan layanan Pos Lintas Batas Negara, dan pembentukan mekanisme koordinasi bilateral yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

3. Kawasan Ekonomi Khusus sebagai instrumen transformasi ekonomi perbatasan

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi wilayah perbatasan. Jika perdagangan lintas batas lebih banyak bergerak pada level masyarakat dan kebutuhan harian, maka Kawasan Ekonomi Khusus berperan dalam membangun struktur ekonomi yang lebih luas melalui investasi, industri pengolahan, logistik, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kajian Asian Development Bank, Special Economic Zones dalam kerangka Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat kerja sama ekonomi subregional, meningkatkan investasi, dan mendorong pembangunan kawasan berbasis keunggulan wilayah.

Dalam konteks Indonesia–Malaysia, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah perbatasan dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan potensi lokal, seperti agroindustri, perikanan, hasil hutan, energi, logistik, pariwisata perbatasan, dan industri pengolahan berbasis komoditas. Dengan demikian, KEK tidak hanya berfungsi sebagai kawasan investasi, tetapi juga sebagai pusat penguatan nilai tambah ekonomi lokal. Perdagangan lintas batas yang semula bersifat tradisional dapat ditingkatkan menjadi bagian dari rantai pasok formal yang lebih terorganisasi dan berdaya saing.

4. Integrasi perdagangan lintas batas dan Kawasan Ekonomi Khusus

Temuan penting dari kajian ini adalah bahwa perdagangan lintas batas dan Kawasan Ekonomi Khusus sebaiknya tidak dipahami sebagai dua kebijakan yang terpisah. Keduanya justru dapat saling melengkapi dalam membangun ekonomi wilayah perbatasan. Perdagangan lintas batas menyediakan basis aktivitas ekonomi masyarakat lokal, sedangkan KEK menyediakan kerangka struktural untuk memperkuat investasi, produksi, distribusi, dan ekspor. Apabila kedua instrumen ini diintegrasikan, maka wilayah perbatasan dapat berkembang dari sekadar jalur keluar-masuk barang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan konektivitas antara PLBN, pusat logistik, kawasan industri, pelabuhan, dan sentra produksi lokal. Selain itu, UMKM perbatasan perlu dilibatkan dalam ekosistem KEK agar tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan kawasan ekonomi. Produk lokal masyarakat perbatasan dapat diarahkan masuk ke rantai pasok kawasan ekonomi melalui standarisasi produk, fasilitasi izin usaha, pelatihan ekspor, digitalisasi pemasaran, dan kemitraan dengan pelaku industri. Dengan cara ini, pembangunan KEK tidak hanya berorientasi pada investasi besar, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat perbatasan.

5. Peran kerja sama subregional dan konektivitas ASEAN

Pengembangan ekonomi perbatasan Indonesia–Malaysia juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka kerja sama subregional dan integrasi ekonomi ASEAN. Wilayah Indonesia dan Malaysia merupakan bagian dari konektivitas ekonomi yang lebih luas, termasuk dalam skema Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle. IMT-GT sendiri telah dikembangkan sejak 1993 sebagai inisiatif kerja sama ekonomi subregional yang melibatkan provinsi dan

negara bagian di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas, investasi, perdagangan, dan pembangunan koridor ekonomi. Dalam kerangka ASEAN, integrasi ekonomi kawasan menuntut adanya konektivitas yang lebih kuat, peningkatan perdagangan, penguatan investasi, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Dokumen ASEAN Economic Community menekankan pentingnya kawasan ekonomi yang terintegrasi, kompetitif, inovatif, serta terhubung dengan ekonomi global. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar integrasi ekonomi regional, bukan hanya sebagai isu pembangunan lokal.

6. Hambatan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ekonomi wilayah perbatasan masih menghadapi beberapa hambatan. Pertama, keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik menyebabkan biaya distribusi barang menjadi tinggi. Kedua, belum optimalnya integrasi regulasi antara Indonesia dan Malaysia menghambat kelancaran perdagangan formal. Ketiga, kapasitas pelaku usaha lokal masih terbatas, terutama dalam hal permodalan, standardisasi produk, digitalisasi, dan akses pasar. Keempat, pembangunan kawasan ekonomi sering kali belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi perbatasan membutuhkan pendekatan multidimensi. Pemerintah tidak cukup hanya membangun fasilitas fisik seperti jalan, pos lintas batas, atau kawasan industri, tetapi juga perlu membangun ekosistem ekonomi yang mendukung produktivitas lokal. Ekosistem tersebut mencakup regulasi yang jelas, pembiayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, digitalisasi perdagangan, fasilitas logistik, serta kerja sama bilateral yang berkelanjutan. Tanpa pendekatan tersebut, perdagangan lintas batas berisiko tetap berada dalam skala kecil dan informal.

7. Strategi pengembangan ekonomi perbatasan Indonesia–Malaysia

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat konektivitas infrastruktur antara kawasan produksi, PLBN, pelabuhan, dan pusat distribusi. Kedua, harmonisasi regulasi perdagangan lintas batas perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat bergerak dari sektor informal menuju sektor formal. Ketiga, Kawasan Ekonomi Khusus perlu dikembangkan berbasis potensi lokal, bukan hanya berdasarkan kepentingan investasi dari luar. Keempat, UMKM perbatasan perlu diberdayakan melalui pelatihan, sertifikasi, akses pembiayaan, dan integrasi ke rantai pasok kawasan ekonomi.

Kelima, kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia perlu diarahkan pada model collaborative border economic governance. Model ini menempatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan lembaga lintas negara sebagai aktor yang saling terhubung. Keenam, digitalisasi perdagangan perlu diperkuat melalui sistem informasi pasar, pencatatan transaksi lintas batas, layanan kepabeanan digital, dan promosi produk lokal berbasis platform digital. Strategi ini penting agar wilayah

perbatasan tidak hanya menjadi ruang transaksi tradisional, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi modern yang produktif dan berkelanjutan.

8. Implikasi terhadap pembangunan wilayah perbatasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki implikasi penting bagi pemerataan pembangunan nasional. Jika dikelola secara tepat, wilayah perbatasan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi ketimpangan antara pusat dan pinggiran. Perdagangan lintas batas dapat menjadi fondasi ekonomi masyarakat, sedangkan Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi motor transformasi struktural melalui investasi, industrialisasi, dan peningkatan nilai tambah komoditas lokal.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi perbatasan harus diarahkan pada integrasi antara pendekatan lokal dan regional. Pendekatan lokal diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat perbatasan memperoleh manfaat langsung dari aktivitas ekonomi. Sementara itu, pendekatan regional diperlukan untuk menghubungkan wilayah perbatasan dengan rantai pasok ASEAN dan ekonomi global. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia melalui perdagangan lintas batas dan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan strategi penting untuk memperkuat konektivitas, daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan kedaulatan ekonomi nasional.

Sintesis Hasil dan Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas merupakan fondasi ekonomi masyarakat perbatasan, sedangkan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi wilayah. Keduanya perlu diintegrasikan melalui kebijakan yang menekankan konektivitas, harmonisasi regulasi, penguatan UMKM, investasi produktif, dan kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia. Dengan integrasi tersebut, wilayah perbatasan tidak lagi diposisikan sebagai kawasan pinggiran, tetapi sebagai ruang strategis pembangunan ekonomi nasional dan regional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki peran strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, konektivitas regional, dan integrasi ekonomi kawasan. Wilayah perbatasan tidak lagi dapat dipandang sebagai kawasan pinggiran yang hanya berfungsi sebagai batas administratif negara, tetapi perlu ditempatkan sebagai ruang ekonomi produktif yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, logistik, investasi, dan pengembangan industri berbasis potensi lokal. Perdagangan lintas batas menjadi instrumen penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan, pemenuhan kebutuhan barang, mobilitas sosial-ekonomi, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Namun, perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, perbedaan regulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, belum optimalnya layanan kepabeanan, serta masih dominannya aktivitas perdagangan informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi perbatasan belum sepenuhnya dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara Indonesia dan Malaysia, penguatan infrastruktur transportasi dan logistik, serta penyederhanaan prosedur perdagangan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang secara lebih formal, produktif, dan berkelanjutan.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong transformasi ekonomi wilayah perbatasan. KEK dapat berfungsi sebagai pusat investasi, industri pengolahan, distribusi logistik, ekspor, serta peningkatan nilai tambah komoditas lokal. Apabila diintegrasikan dengan perdagangan lintas batas, KEK dapat memperkuat rantai pasok, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing wilayah, dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Dengan demikian, perdagangan lintas batas dan KEK sebaiknya tidak dipahami sebagai dua kebijakan yang terpisah, melainkan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam pembangunan ekonomi perbatasan.

Secara akademik, kajian ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia membutuhkan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek perdagangan lintas batas, tata kelola kelembagaan, konektivitas infrastruktur, pemberdayaan UMKM, investasi, dan kerja sama bilateral. Pendekatan ini penting agar pembangunan perbatasan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, penguatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi perbatasan perlu diarahkan pada model pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan perdagangan lintas batas dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Jika strategi tersebut dilaksanakan secara konsisten, wilayah perbatasan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi ASEAN, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aggarwal, A. (2022). *Special economic zones in the Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle: Opportunities for collaboration*. Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/TCS210449-2>
- ASEAN. (2015). *ASEAN 2025: Forging ahead together*. ASEAN Secretariat.
- Asian Regional Integration Center. (n.d.). *Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT-GT) initiative*. Asian Development Bank.

- Darmawan, W. B., & Riyadi, S. F. (2024). Malaysia–Indonesia cross border governance policy in accelerating economic development. *Journal of Governance*, 9(4), 748–763. <https://doi.org/10.31506/jog.v9i4.29878>
- Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle. (2022). *IMT-GT implementation blueprint 2022–2026*. IMT-GT.
- Prameswari, S. R., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2024). Policy analysis on border trade between Indonesia and Malaysia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 17(12), 123–136.
- Raharjo, S. N. I., & Idris, H. (2025). Reimagining cross-border cooperation from Indonesia–Malaysia experiences: A thematic literature review. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 13(1), 117–137. <https://doi.org/10.21512/jas.v13i1.12440>
- Rudiatin, E. (2025). Local-global economy at the Indonesia–Malaysia border: Cross-border trade between Temajuk and Telok Melano. *Jurnal Politik Profetik dan Sosial*.